



## **Studium Generale FISIP UB 2017, Demokrasi dan Otonomi Daerah perlu dieftifikan di Indonesia**

Memasuki bulan kedua perkuliahan, FISIP UB menggelar Studium Generale (Kuliah Tamu) yang diperuntukkan khusus bagi Mahasiswa FISIP UB angkatan 2017. Kuliah tamu yang digelar merupakan rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (3/10/17). Tujuan dari diadakannya acara tersebut untuk memberi pemahaman seputar tema Demokrasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Pada agenda tersebut, FISIP UB menghadirkan pembicara yakni Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. selaku perwakilan dari Lembaga Penelitian Ilmiah Indonesia (LIPI) yang dimoderatori oleh Dosen Ilmu Politik FISIP UB, Wawan Sobari, Ph.D. Sebagaimana yang diketahui sistem otononomi merupakan sistem pemerintahan rakyat dengan mendekatkan pertanggung jawaban kepada rakyat. Mengutip pendapat Bung Hatta pada pidato wakil presiden di rapat Pematang Siantar tanggal 22 November 1950, Siti Zuhro mengatakan "Jikalau di pusat saja diadakan demokrasi, maka kontrol dari rakyat jauh sekali dan tidak langsung, maka dari itu diperlukan sistem otonomi untuk mendekatkan pertanggung jawaban masyarakat terhadap rakyat," paparnya. Pada sesi materi, Zuhro juga mengutip pendapat Bung Karno tentang pentingnya otonomi daerah, "Keberadaan otonomi daerah diperlukan agar rakyat dapat mengontrol pemerintah serta agar setiap daerah dengan karakteristik dan kekhasannya tersebut dapat menentukan nasibnya sendiri". Ujarnya. Namun meskipun begitu, keberadaan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa masalah. Zuhro menjelaskan kendala tersebut seperti berupa koordinasi dan sinergi antarjaring pemerintahan yang kurang efektif sehingga menyebabkan pembangunan antarsektor di pusat dan dinas di beberapa daerah. Pada intinya, keberadaan otonomi daerah sampai sekarang ini belum efektif di Indonesia, sebagaimana fakta yang digambarkan di lapangan, hanya sekitar sepuluh persen dari daerah di Indonesia yang menjalankan sistem otonomi daerah. Melalui rangkaian kuliah tamu tersebut, mahasiswa diharapkan untuk dapat berkontribusi dengan mengembangkan ide dan penelitiannya seputar dunia pemerintahan di Indonesia. (Anata/Novia/ Humas FISIP UB)